

BAB IV

ALASAN JEPANG MENJALIN KERJASAMA KEAMANAN DENGAN FILIPINA DI TAHUN 2013

Pada bab ini, penulis akan memaparkan alasan yang melatarbelakangi Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina terkait sengketa Laut China Selatan pada tahun 2013. Menurut penulis, dengan meningkatnya kewaspadaan keamanan di Asia Pasifik terkait sengketa di Laut China Selatan, mengakibatkan Jepang sadar untuk melakukan penjagaan untuk tetap menjalankan kepentingannya yang banyak bersinggungan dengan kawasan konflik tersebut. Jepang telah berupaya memberikan bantuan kepada Filipina yang terlibat secara langsung pada sengketa Laut China Selatan dan Jepang merasa perlu memanfaatkan geostrategis Filipina dalam menjalankan geopolitiknya ke Tiongkok. Dengan alasan pertimbangan adanya ancaman Tiongkok di Laut China Timur hingga Laut China Selatan.

A. Peningkatan Kapabilitas Militer Tiongkok dan Agresifitasnya di Kawasan Asia Pasifik

Perubahan iklim keamanan di Asia Pasifik sangat signifikan terasa pada tahun 2010-an. Perubahan ini mempengaruhi situasi politik dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Pasifik hingga luar kawasan, bahkan sampai menjadi perhatian dunia internasional. Terjadinya perselisihan antara Jepang dan Tiongkok di Laut China Timur dan Laut China Selatan yang merupakan ancaman lebih besar terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya itu, tensi antara Jepang dan Tiongkok meningkat seiring dengan meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok. Agresifitas Tiongkok dalam ekspansi kekuatan militernya mengklaim sepenuhnya Laut China Selatan dan Timur. Agresifitas Tiongkok inilah yang akhirnya membuat Jepang menjalin kerjasama keamanan

dengan Filipina tahun 2013 sebab mempertimbangkan adanya peningkatan potensi ancaman dari Tiongkok atas kedaulatan Jepang dan stabilitas regional Asia Pasifik.

1. Kapasitas Militer Tiongkok dalam Politik Internasional

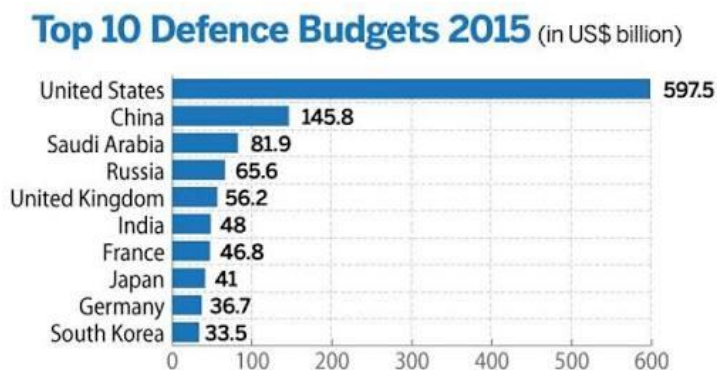
Jepang melihat bahwa kapasitas militer yang dimiliki Tiongkok saat ini dapat berpotensi menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan kedaulatan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Kekhawatiran Jepang semakin bertambah karena anggaran pertahanan Tiongkok yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok yang semakin membaik. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok dapat menjelma sebagai kekuatan baru dalam skala global dan regional.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok, pemerintah Tiongkok menaruh perhatian lebih terhadap sektor militernya. Konsentrasi tersebut diwujudkan dalam suatu kebijakan pertahanan Tiongkok untuk melindungi dan menjaga stabilitas kedaulatan Tiongkok beserta segala sumber ekonomi negara tersebut. Hal ini terlihat secara nyata bahwa anggaran belanja militer Tiongkok meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang fantastis. Pemerintah Tiongkok memberikan porsi yang besar untuk modernisasi postur militer Tiongkok.¹ Tentunya, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok tersebut selaras dengan pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang ditandai dengan peningkatan *Grass Domestic Product* (GDP) Tiongkok setiap tahunnya. Sebagai negara dengan perolehan GDP tertinggi kedua di dunia, suatu hal yang wajar bila Tiongkok menempatkan konsentrasinya untuk

¹ Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.

meningkatkan pertahanan dan keamanan negara melalui peningkatan anggaran belanja militer.²

Gambar 3. Sepuluh Besar Anggaran Pertahanan Negara Tahun 2015



Sumber: <http://www.gcmfg.com/defense-budget-capture-technical-resume-business/840/> diakses pada 7 Desember 2017

Diagram diatas menunjukkan pada tahun 2015 jumlah anggaran pertahanan Tiongkok sebesar \$145,8 milyar dan berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Besaran anggaran ini cukup fantastis walaupun nilai dua kali lipat nya pun belum dapat menyamai anggaran pertahanan milik Amerika Serikat. Dari diagram diatas juga terlihat bahwa jumlah anggaran Jepang sebesar \$41 milyar dan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggaran pertahanan Tiongkok. Dengan demikian Tiongkok akan dapat mewujudkan keinginannya untuk melakukan revolusi secara komprehensif terhadap angkatan bersenjata Tiongkok sesuai dengan apa yang

² Jakarta Greater, *Anggaran Pertahanan China 2014*, dalam <http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-china-2014/>, diakses pada 20 November 2017

diungkapkan oleh ketua parlemen Tiongkok Le Keqiang dalam sebuah sidang parlemen tahunan. Selain itu pemerintah Tiongkok juga berkomitmen untuk melakukan modernisasi serta upaya meningkatkan kinerja serta kapabilitas kemampuan tempur pasukan bersenjata Tiongkok untuk menghadapi suatu ancaman.³

Dalam Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok, perwujudan pembangunan pertahanan militer Tiongkok akan diselenggarakan secara berkelanjutan mengiringi pertumbuhan perekonomian Tiongkok secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Tiongkok mengawal pengeluaran belanja pertahanan agar terjaga dalam nilai yang berada dalam batas wajar dan terkendali agar dapat menjaga stabilitas politik serta perekonomian dalam negeri Tiongkok. Upaya peningkatan kapabilitas militer Tiongkok dari tahun ke tahun diperuntukkan untuk memenuhi kelima tujuan utama militer Tiongkok yaitu terwujudnya keamanan rezim, integrasi teritorial, penyatuan nasional, keamanan maritime dan stabilitas regional.⁴

Upaya mewujudkan tujuan militer Tiongkok dapat dilakukan dengan cara memenuhi segala kebutuhan militer mulai dari anggaran, persenjataan dan serangkaian postur militer lainnya. Kebijakan peningkatan anggaran militer Tiongkok dari tahun ke tahun yang terus meningkat bukan tanpa maksud. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Tiongkok, peningkatan anggaran militer ditujukan untuk memenuhi berbagai pembiayaan yang dibutuhkan oleh sektor militer Tiongkok diantaranya untuk pembiayaan sebagai berikut;

³ Jakarta Greater, *Anggaran Pertahanan China 2014*, dalam <http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-china-2014/>, diakses pada 20 November 2017

⁴ Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012

(1) personil dan sistem pengaman sosial, (2) reformasi struktural dan organisasi dalam tubuh pasukan militer Tiongkok yakni *People's Liberation Army* (PLA), (3) kerjasma dan aksi internasional, (4) investasi penciptaan “*high-caliber talents in the military*”.⁵

Pengalokasian anggaran pertahanan Tiongkok diperuntukkan untuk tiga jenis pengeluaran utama yakni sektor personil, pelatihan dan perawatan, serta peralatan dalam postur militer Tiongkok. Kebijakan pemerintah Tiongkok tersebut dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk mempertahankan prinsip hak dan kepentingan maritim. Dengan demikian terciptalah sebuah korelasi yang signifikan dimana Tiongkok yang berada pada posisi ekonomi yang baik dan terus meningkat akan semakin memperkuat eksistensinya melalui pengembangan kapabilitas militernya. Besarnya anggaran pertahanan Tiongkok yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan Tiongkok muncul menjadi sebuah kekuatan baru tidak hanya sebatas di kawasan regional Asia Pasifik namun dapat mengeksplorasi kekuatan militernya secara global. Kondisi inilah yang membuat Tiongkok memiliki kepercayaan diri lebih dalam persaingan dengan negara-negara di regional Asia Pasifik.⁶

Tiongkok melakukan peremajaan dan modernisasi terhadap postur militernya serta perubahan doktrin operasional militer dalam *People's Liberation Army* (PLA).⁷ Walaupun sebelumnya pada tahun 1989 akibat dari terjadinya tragedi Tiannanmen, Tiongkok mendapat sanksi embargo senjata dari

⁵ Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 9

⁶ Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Op.Cit*, hal, 11

⁷ Wendy Andhika, *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*, Jurnal Hubungan Internasional, Hal.2

Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun bukan berarti Tiongkok tidak dapat melakukan modernisasi pada sistem persenjataan. Tiongkok membelokkan arah kerjasama militernya ke Rusia yang akhirnya berhasil menjadi suplier persenjataan Tiongkok terbesar dengan nilai prosentase penjualan senjata ke Tiongkok sebesar 95%. Suplai persenjataan yang dikirimkan ke Tiongkok antara lain;

1. Pesawat tempur Su-30 dan Su-37
2. Misil udara (*Air to Air Missiles/ AAMs*) AA-12
3. Sistem misil ke permukaan udara (*Surface to Air Missiles/ SAM*), SA-10, SA-15, SA-20
4. 3M-54E (SS-N-27B) ASCMs
5. Kapal selam kelas – KILO
6. Kapal selam penghancur kelas-II Sovremenny
7. Pesawat tempur transport II-76
8. Pesawat tempur tanker IL-78
9. Sistem penggabungan senjata ⁸

Selain mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembelanjaan dan pengembangan persenjataan seperti yang telah disebutkan diatas, pada tahun 2012 Tiongkok membangun kapal induk, pesawat tempur yang tidak dapat terdeteksi oleh radar dan mengembangkan rudal yang dapat menembak jatuh satelit walaupun dalam tes uji coba masih butuh optimalisasi beberapa tahun untuk dapat dioperasikan secara maksimal.⁹ Hingga pada tahun 2013 Tiongkok juga berhasil memproduksi kapal selam diesel-listrik (SONG) yang

⁸ Rezki Satris, *Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik*, The POLITICS, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015, Hal. 98

⁹ Lisbet, *Peningkatan Kekuatan Militer China*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2012, Hal.6

dapat meluncurkan misil dari bawah laut serta berhasil meng-*upgrade* persenjataan lainnya.¹⁰

Peningkatan kapasitas militer juga menjadi agenda Tiongkok, yang mana perhatiannya berubah arah fokus pada optimalisasi pembangunan Angkatan Laut dan Udara dibandingkan Angkatan Darat. Proses optimalisasi tersebut didukung oleh kapasitas personel militer Tiongkok itu sendiri yang terdiri dari 2.255.000 tentara aktif, 800.000 tentara cadangan dan 3.969.000 paramiliter aktif.¹¹

Pada sisi yang lain, doktrin pertahanan Tiongkok sangat mempengaruhi kebijakan militer Tiongkok. Doktrin pertahanan tersebut merupakan bagian vital dalam kebijakan militer Tiongkok meliputi perencanaan, implementasi, dan strategi perlawanan dalam sebuah peperangan. Evolusi doktrin pertahanan Tiongkok terlihat dalam 4 rumusan yaitu *People's War*, *People's War Under Modern Condition*, *local/Limited War*, dan *Local/Limited War Under High Technology Conditions*. Doktrin pertahanan Tiongkok pada awalnya merupakan warisan dari Mao Zedong yang mengkonsepsikan sebuah doktrin militer *People's War* dan *Active Defense* sebagai strategi militer sebagai panduan dijalankannya kebijakan militer Tiongkok. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut tidak relevan untuk diaplikasikan. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, doktrin pertahanan Tiongkok diperbaharui menyesuaikan kondisi politik keamanan yang terjadi pada saat itu sehingga terciptalah doktrin baru berupa *People's War Under Modern Conditions*. Walaupun berkali-kali mengalami evolusi terhadap doktrin pertahanan Tiongkok, dewasa ini doktrin pertahanan Tiongkok dalam babak baru. Sesuai yang terdapat dalam Buku Putih Pertahanan Tiongkok,

¹⁰ Wendy Andhika, *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*, Jurnal Hubungan Internasional, Hal.3

¹¹ *Ibid.*

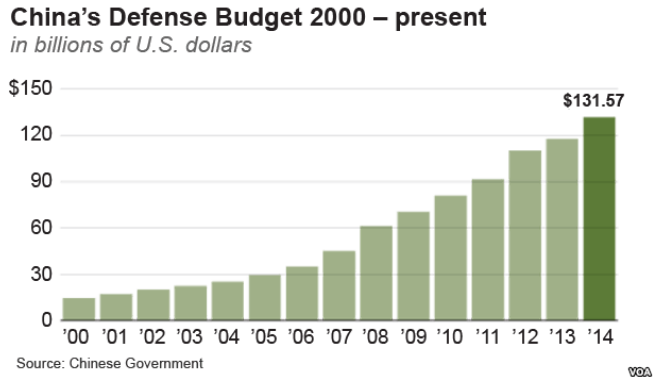
kebijakan pertahanan Tiongkok berorientasi pada; (a) penegakkan keamanan dan persatuan nasional, (b) penjaminan kepentingan pembangunan nasional, (c) pencapaian di semua bidang, (d) pembangunan yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari kekuatan bersenjata serta keamanan nasional Tiongkok, (e) peningkatan kinerja angkatan bersenjata dengan informalisasi sebagai ukuran utama, (f) penerapan strategi pertahanan aktif, (g) pengejaran strategi pertahanan negara dengan nuklir dan pengembangan lingkungan keamanan Tiongkok yang kondusif untuk mendukung perkembangan Tiongkok yang damai. Pemerintah Tiongkok juga memiliki rumusan panduan strategi militer pertahanan secara aktif guna menghadapi perkembangan situasi keamanan internasional yang dirancang untuk meraih kemenangan perang lokal di era informasionalisasi.¹²

2. Tiongkok sebagai Kekuatan Terbesar di Asia Pasifik

Peningkatan kapasitas militer Tiongkok yang terjadi tiap tahun berhasil memosisikan diri sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Pasifik. Dapat diartikan pula bahwa pada saat ini Tiongkok adalah negara terkuat di Asia. Terdapat kemungkinan yang cukup besar Tiongkok akan terus menambah kapasitas militernya hingga dapat mewujudkan ambisinya untuk menguasai dunia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada anggaran pertahanan Tiongkok yang terus meningkat dalam kurun waktu 14 tahun terakhir sejak tahun 2000.

¹² Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012

Gambar 4. Anggaran Pertahanan Tiongkok Tahun 2000-2014



Sumber:<http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-Tiongkok-2014/> diakses pada 8 Desember 2017

Berdasarkan diagram diatas, didapat informasi bahwa anggaran pertahanan Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping sejak tahun 2000 setiap tahunnya meningkat. Tercatat pada tahun 2014, anggaran militer Tiongkok mencapai angka tertinggi sebesar \$131,5 milyar dengan nilai prosentase sebesar 12,2% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹³

Pertumbuhan dan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok yang terjadi setiap tahunnya menjadi pertimbangan bagi Jepang untuk merumuskan kebijakan keamanan Jepang. Hal itu disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Jepang yang disahkan pada awal Agustus 2014 sebagai mekanisme pelaksanaan sistem pertahanan Jepang. Buku Putih Pertahanan Jepang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1970 dan sejak tahun 1976 Pemerintah Jepang secara berkala memperbaharui

¹³ Jakarta Greater, *Anggaran Pertahanan China 2014*, dalam <http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-china-2014/>, diakses pada 20 November 2017

buku tersebut. Buku Putih setebal 500 halaman tersebut memuat empat cakupan pertahanan Jepang yang terdiri dari lingkungan Jepang, kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, inisiatif pertahanan Jepang, serta pertahanan Jepang. Di dalam Buku Putih Pemerintah Jepang menyebutkan Tiongkok sebagai salah satu ancaman di Laut China Timur. Bahwa perkembangan militer Tiongkok yang baru-baru ini mengalami peningkatan dengan segala kecanggihan postur militer yang dimilikinya, dan agresifitas Tiongkok di Laut China Timur dan Laut China Selatan merupakan ancaman nyata bagi Jepang. Dengan demikian kebijakan pertahanan Jepang mengarah pada konflik Laut China Pasifik, melindungi kedaulatan yakni kepulauan Senkaku dan menitik beratkan perhatian kepada agresifitas militer Tiongkok di kawasan tersebut. Buku Putih tersebut memiliki efek penggetar atau *deterrence* untuk Tiongkok yang merupakan keuntungan tersendiri bagi Jepang.¹⁴

Melalui mekanisme pertahanan yang tertulis dalam Buku Putih, peran militer Jepang atau pasukan SDF diperluas jangkauannya tidak hanya di Laut China Timur. Perluasan jaringan tersebut dalam rangka menjalin kerjasama militer dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Vietnam, Filipina, dan Australia yang notabene juga berkonflik dengan Tiongkok. Jepang berusaha menyamakan persepsi dengan negara-negara tersebut bahwa Tiongkok merupakan ancaman. Ketika Jepang dan negara yang berpotensi menjadi sekutunya memiliki pandangan yang sama bahwa peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang tidak transparan tersebut adalah ancaman, maka memungkinkan terciptanya kerjasama yang menguntungkan. Jika benar akan terjalin sebuah aliansi baru maka akan ada kerjasama yang lebih erat untuk menghadapi musuh bersama dalam bentuk

¹⁴ Rizki Roza, *Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya Terhadap Sengketa Laut China Timur*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2014, Hal.5-6

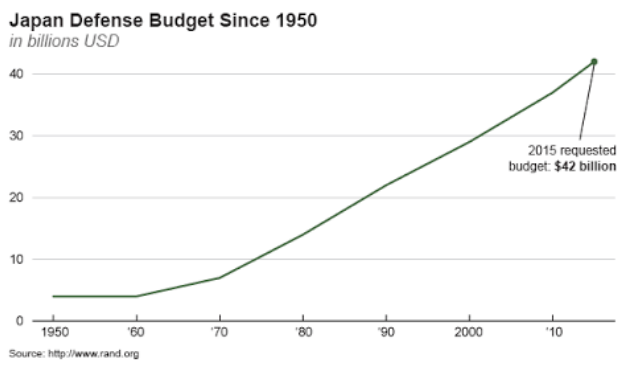
pertukaran informasi intelejen, *collective self defense* seperti Jepang dan Amerika Serikat, serta dapat juga berupa kerjasama triangular atau trilateral.¹⁵

Buku Putih Pertahanan Jepang juga memuat tentang keinginan Pemerintah Jepang untuk melakukan pemaknaan ulang atau reinterpretrasi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi landasan pasifisme militer Jepang selama ini. Dengan adanya amandemen Pasal 9 maka militer Jepang dapat aktif seperti militer yang dimiliki oleh negara normal. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang selama ini berlaku sebagai aliansi yang juga menjadi payung militer Jepang. Aktifnya kembali militer Jepang secara otomatis akan berdampak pada *sharing budget* antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi sepadan. Sebagai bagian dari strategi Jepang menghadapi ancaman Tiongkok di Laut China Selatan, Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2012. Jepang yang lebih dulu terlibat dalam sengketa Laut China Selatan berupaya membantu Filipina sehubungan dengan melemahnya Amerika Serikat dalam sengketa Laut China Selatan dan Amerika Serikat berupaya membuat Jepang mandiri dalam hal militernya.

Jepang terus berupaya meningkatkan kapasitas militernya, hal ini dilakukan sebagai sebah cara dalam menghadapi dan mengimbangi kekuatan militer Tiongkok. Setiap tahun Jepang menambah besaran anggaran pertahanan Jepang yang tentunya untuk meningkatkan mutu personil SDF dan persenjataan serta fasilitas militer termasuk logistik dan transportasi.

¹⁵ Rizki Roza, *Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya Terhadap Sengketa Laut China Timur*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2014, Hal.7

Gambar 5. Anggaran Pertahanan Jepang Sejak tahun 1950-2015



Sumber: <http://www.voanews.com/a/japan-cabinet-approves-third-straight-defense-boost/2597568.html> diakses pada 10 Desember 2017

Berdasarkan gambar grafik diatas, anggaran pertahanan Jepang terus meningkat sejak tahun 1950. Anggaran pertahanan Jepang mencapai \$42 milyar pada tahun 2015 dan merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah pertahanan Jepang pasca Perang Dunia II berakhir. Dibawah komando Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, kenaikan anggaran pertahanan tahun 2015 sebesar 2% dari tahun sebelumnya ditujukan untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di sekitar Jepang – termasuk potensi ancaman Tiongkok. Anggaran pertahanan Jepang yang baru dialokasikan untuk pembelian 20 pesawat patroli laut, 5 pesawat *crosscover*, 3 pesawat tanpa awak (*drone*), 6 pesawat siluman, dan rencana pembelian 30 unit amfibi.¹⁶

¹⁶ Muhammad Shamil dan Andika Hendra, *Jepang China Berlomba Perkuat Militer*, SindoNews,

Dilihat dari sudut pandang keseimbangan militer maritim di Asia khususnya Asia Timur, kekuatan maritim Tiongkok adalah yang terbesar. Hal ini terlihat dari jumlah aset militer maritime yang dimiliki Tiongkok dibandingkan dengan aset militer maritime negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur. Perbandingan keseimbangan tersebut berdasarkan banyaknya jumlah aset militer maritim yang dimiliki masing-masing negara yakni dari segi personil, kapal perang PSC (*Principle Surface Combatant*), peralatan tempur darat dan laut, amfibi, kapal selam, dan kapal induk. Jepang sendiri memiliki 42.400 personil, 52 kapal perang PSC, 7 peralatan tempur darat dan laut, 25 amfibi, 16 kapal selam dan 0 kapal induk. Sedangkan jika dibandingkan dengan aset militer maritim yang dimiliki oleh Tiongkok, Jepang masih tertinggal jauh. Tiongkok memiliki 255.000 personil, 80 kapal perang PSC, 253 peralatan tempur darat dan laut, 83 amfibi, 65 kapal selam dan 1 kapal induk.¹⁷

Jepang khawatir terhadap kebangkitan kekuatan militer Tiongkok yang diprediksi akan menjadi raksasa militer Asia. Dengan melihat catatan sejarah selama ini, terdapat tiga kondisi yang memungkinkan Jepang menghadapi Tiongkok sebagai ancaman secara langsung. Pertama, jika pecah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, maka Jepang dapat terlibat langsung dalam konflik tersebut karena dalam perkembangan cakupan aliansi Jepang dan Amerika Serikat dalam taraf *collective security*. Kedua, Jepang dapat terlibat dalam konflik langsung dengan Tiongkok yang timbul oleh adanya permasalahan teritorial klaim Pulau Senkaku serta perebutan sumber daya laut di perairan Laut China Timur. Ketiga, agresifitas militer Tiongkok di Laut China Selatan dan kepentingan nasional Tiongkok melalui klaim penuh atas

<https://nasional.sindonews.com/read/973848/149/jepang-china-berlomba-perkuat-militer-1425868836/13>, 9 Maret 2015

¹⁷ Kerry Lynn S. Nankivell, *Asia Suatu Restroktif Maritim*, Asia Pacific Defense FORUM, 2015, Hal.14

sebagian besar wilayah di Laut China Selatan yang mengancam keamanan Jepang.¹⁸

Untuk menghadapi isu keamanan terkait potensi Tiongkok sebagai ancaman Jepang di Asia Timur, Departemen Pertahanan Jepang berupaya memaksimalkan kapasitas militer Jepang. Setelah adanya reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang semakin menonjolkan kekuatan militernya dan meluaskan peran SDF di kancah global. Kapasitas militer Jepang yang terus meningkat, prediksi bahwa Jepang memiliki peluang untuk menjadi negara terkuat di Asia dalam waktu 10 tahun mendatang sangat mungkin terjadi. Namun jika dilakukan perbandingan kekuatan militer antara Jepang dan Tiongkok saat ini, Jepang masih tertinggal jauh dari Tiongkok.¹⁹

Dalam suatu pernyataan, walaupun pemerintah Tiongkok berdalih bahwa peningkatan kapasitas dan anggaran militernya masih dalam taraf rendah jika dibandingkan dengan penduduk Tiongkok yang mencapai 1,3 milyar jiwa dan wilayah teritorial Tiongkok yang luas baik darat, udara, serta laut dengan garis pantai yang panjang. Namun hal ini tidak dapat mengurangi rasa kekhawatiran Jepang atas ancaman yang mungkin akan datang. Tidak ada jaminan bahwa Tiongkok dengan militer kuat tidak akan menyerang Jepang dan membahayakan keamanan Jepang, sehingga rasional bahwa Jepang menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2013.

¹⁸ Wendy Andhika, *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*, Jurnal Hubungan Internasional, Hal.3

¹⁹ Muhammad Shamil dan Andika Hendra, *Jepang China Berlomba Perkuat Militer*, SindoNews, <https://nasional.sindonews.com/read/973848/149/jepang-china-berlomba-perkuat-militer-1425868836/13>, 9 Maret 2015

B. Agresifitas Militer Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik

Tiongkok telah berhasil muncul sebagai kekuatan baru di Asia dengan besarnya kapasitas militer Tiongkok yang menempati posisi kedua dalam daftar 10 negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Pada skala regional Asia Pasifik, kekuatan militer Tiongkok merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Dengan kapasitas militer yang semakin besar tiap tahunnya, kebijakan keamanan Tiongkok cenderung ekspansif di kawasan. Hal ini terlihat dari ambisi Tiongkok memperluas wilayah kekuasaannya di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Agresifitas Tiongkok di kedua wilayah tersebut dipandang Jepang sebagai ancaman atas keamanan Jepang dan stabilitas kawasan Asia Pasifik.

1. Tiongkok sebagai Ancaman di Laut China Timur

Keyakinan Pemerintah Jepang akan datangnya ancaman dari peningkatan kapabilitas militer Tiongkok semakin kuat. Hal ini dibuktikan oleh adanya kebijakan militer Tiongkok yang mengusik pertahanan wilayah perairan Jepang di Laut China Timur. Perselisihan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok dapat diibaratkan seperti benang kusut, pasalnya memang bukanlah konflik bersenjata langsung. Menurut beberapa analisis tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan naik status menjadi konflik bersenjata langsung. Sentimen antara keduanya cukup sengit mengingat historis mereka yang terlibat dalam perang *Shino-Japanese War*. Tindakan agresif yang dilakukan Tiongkok ini mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur terlebih dalam wilayah perairan.

Akar masalah dalam perselisihan Jepang dan Tiongkok adalah persoalan perebutan atau klaim terhadap kepemilikan kepulauan yang berada di Laut China Timur. Dalam pandangan Jepang, pulau Senkaku yang diperebutkan oleh kedua negara – atau yang dalam pandangan Tiongkok disebut juga dengan pulau Diaoyu, berada pada lokasi strategis di

tengah-tengah antara Okinawa dan Taiwan. Konflik ini timbul pasca Perang Dunia II berakhir, walau sebenarnya kedua negara telah lama melakukan klaim jauh sebelum itu.²⁰

Baik Jepang maupun Tiongkok saling mempertahankan klaim wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari kedaulatan masing-masing negara. Sejak tahun 2012 perseteruan ini mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Pada September 2012, Jepang mengumumkan telah membeli kepulauan Senkaku seharga \$30 juta dari sebuah keluarga yang dianggap sebagai pemilik dari kepulauan tersebut. Jepang semakin mengukuhkan administrasi kepemilikan kepulauan Senkaku sebagai aset negara dan kedaulatan Jepang. Pembelian kepulauan Senkaku tersebut dianggap tidak sah oleh Tiongkok, Jepang dianggap mencuri wilayah kedaulatan Tiongkok. Situasi kian memanas, hingga baik Jepang maupun Tiongkok bersamaan memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan patroli perairan ketat di Laut China Timur hampir setiap minggu. Tensi tinggi antara pasukan militer kedua negara terjadi tidak hanya di wilayah perairan saja karena kapal-kapal milik Tiongkok hampir memasuki wilayah teritorial Jepang, namun juga terjadi di udara.²¹

Kondisi yang berkembang semakin tidak terkontrol dimana permasalahan klaim wilayah ini menembus ranah ekonomi dan hubungan diplomatik. Perdana Menteri Jepang memanggil Duta Besar Tiongkok untuk melayangkan protes terhadap pemerintah Tiongkok yang mengirimkan kapal-

²⁰ Rizki Roza, *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2012

²¹ Staf Forum, *Ketegangan di Laut China Timur*, Asia Pacific Defense Forum, 2015, Hal.48-51

kapalnya ke sekitar kepulauan Senkaku.²² Pada September 2012 Pemerintah Tiongkok mengirimkan kapal patroli di perairan Laut China Timur untuk mengukuhkan klaimnya. Sebanyak enam kapal pengintai dikirimkan Tiongkok ke wilayah perairan sekitar kepulauan Senkaku sebagai respon atas tindakan Jepang yang membeli pulau Senkaku. Patroli maritim dan pengiriman kapal pengintai ini dimaksudkan untuk mengintimidasi Jepang agar Jepang membatalkan pembelian tersebut.²³

Posisi kepulauan Senkaku yang berada di jalur perdagangan sibuk diantara Taiwan dan Okinawa menambah nilai strategis kepulauan tak berpenghuni seluas 7km² tersebut. Posisi ini menambah nilai strategis yang dimiliki kepulauan Senkaku selain kandungan sumber energi minyak dan gas yang ada disana.²⁴ Tiga dari total lima pulau yang ada di kepulauan Senkaku menjadi perebutan, yaitu Pulau Uotsuri, Pulau Minamikojima bawah, dan Pulau Kitakojima.²⁵

Klaim wilayah oleh Tiongkok tidak hanya dilakukan di Laut China Timur yang menjadi ancaman langsung untuk Jepang. Tiongkok yang cenderung ekspansif juga ingin menguasai perairan Laut China Selatan yang memiliki nilai strategis di kawasan Asia Timur. Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer Tiongkok juga dirasakan Jepang menyangkut agresifitas dan klaim penuh Tiongkok atas Laut China Selatan.

²² Rizki Roza, *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diayu dan Stabilitas Kawasan*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2012, hal.6

²³ Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2015, Hal.218

²⁴ Rizki Roza, *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diayu dan Stabilitas Kawasan*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2012, hal.5

²⁵ Staf Forum, *Ketegangan di Laut China Timur*, Asia Pasific Defense Forum, 2015, hal.49

2. Tiongkok sebagai Ancaman di Laut China Selatan

Fokus perhatian isu keamanan global yang berkembang pasca berakhirnya Perang Dingin mengarah kepada pencapaian terjaminnya keamanan energi masing-masing negara. Dewasa ini kebutuhan akan sumber daya energi bagi suatu negara merupakan kebutuhan dasar sebagai bagian dari kepentingan nasional yang harus dicapai. Hal ini juga yang terjadi di Laut China Selatan yang menjadi sengketa oleh negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Persengketaan Laut China Selatan telah mengganggu stabilitas keamanan Asia Timur, terlebih lagi Tiongkok begitu agresif dalam klaim wilayah tersebut. Agresifitas Tiongkok tersebutlah yang dipandang Jepang menjadi sebuah ancaman lain selain agresifitas Tiongkok di Laut China Timur. Jepang merasa perlu menghentikan upaya Tiongkok tersebut karena selain kepentingan nasional Jepang yang terganggu di Laut China Selatan, Jepang juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan bersama dengan Amerika Serikat yang menjadi negara aliansinya sejak Perang Dunia II berakhir.

Terjadinya tumpang tindih klaim wilayah atas Laut China Selatan terjadi karena masing-masing negara ingin mempertahankan kepentingan nasional mereka. Klaim Tiongkok merupakan yang terbesar, hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dimasukkan ke dalam kedaulatan Tiongkok yang diidentifikasi sekitar 1500km pada garis batas pantai dari Pulau Hainan, Tiongkok. Klaim wilayah perairan Laut China Selatan termasuk di dalamnya kepulauan Spratly dan Paracel yang tidak berpenghuni namun menjadi cikal bakal wilayah yang diperebutkan mengingat posisinya yang strategis.²⁶

²⁶ Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.27

Jepang bukanlah negara yang ikut melakukan klaim wilayah di perairan Laut China Selatan, dan juga bukan negara yang terlibat langsung dalam persengketaan tersebut. Namun untuk menjaga kepentingan nasional Jepang yang berada di Laut China, Jepang berusaha masuk terlibat di dalamnya. Laut China Selatan memiliki stok ikan yang sangat banyak dan sumber daya energi yang melimpah bahkan wilayah tersebut merupakan cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Jepang sendiri mengandalkan dan memanfaatkan perairan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari setengah kebutuhan energi Jepang.²⁷ Tidak hanya itu, jika kekuatan militer Tiongkok dibiarkan agresif dan menguasai Laut China Selatan secara penuh, maka kekhawatiran Jepang akan terisolasi benar terjadi. Sektor perdagangan Jepang sangat tergantung pada Laut China Selatan sebagai jalur keluar masuk kapal dagang baik dari Jepang maupun menuju ke Jepang. Untuk menghadapi agresifitas Tiongkok di Laut China Selatan tersebut, *Maritime SDF* Jepang melakukan latihan gabungan dengan *Navy US Forces* dan Angkatan Laut Filipina di wilayah tersebut. Selain itu, Jepang juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat sengketa tersebut.²⁸

Tiongkok semakin menunjukkan dirinya sangat agresif di laut China Selatan. Setelah berhasil mengusik kedaulatan Jepang di kawasan laut China Timur dengan mempublikasikan perluasan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di atas perairan Laut China Timur yang menyangkut kepulauan

²⁷ Peta Cobus, *Konflik dan Diplomasi di Laut*, dalam <http://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>, Voice of America, 2015, diakses pada 2 Desember 2017

²⁸ Ratna Ajeng Tejumukti, *Jepang Khawatir Dominasi Laut China Selatan*, dalam <http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/22/nqcr-92-jepang-khawatir-dominasi-laut-cina-selatan>, Republika, diakses pada 3 Desember 2017

Senkaku milik Jepang, kini Tiongkok berencana mengumumkan ADIZ-nya di Laut China Selatan. Rancangan ADIZ Tiongkok di Laut China Selatan tersebut luasnya mencakup kepulauan Paracel dan sebagian besar wilayah udara di atas perairan Laut China Selatan. Mekanisme ADIZ memberikan keharusan terhadap pesawat yang akan memasuki dan melewati zona tersebut dengan terlebih dahulu diminta memberikan identitas diri dan informasi tujuan penerbangan, serta tetap mempertahankan kontak radio dengan pihak local yang berwenang. Jika pihak yang berwenang mendapati ada yang hal yang mencurigakan atau kemungkinan membahayakan, maka pihak tersebut akan memburu dan mencegat pesawat tersebut menggunakan jet tempur. Hal inilah yang benar-benar dikecam oleh Jepang dan beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat yang merasa dirugikan dengan tindakan Tiongkok tersebut yang membatasi ruang gerak negara lain di kawasan sengketa yang sebelumnya merupakan perairan bebas.²⁹

Permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan adalah mengenai kedaulatan territorial dan kedaulatan maritim negara-negara yang terlibat. Namun keberadaan sumber daya energi yang terkandung di dalam Laut China Selatan yang menjadi motivasi dibalik perebutan wilayah ini. Keruhnya persengketaan yang terjadi dapat dianalisis dari segi ekonomi, hukum, militer dan politik. Dari segi ekonomi Laut China Selatan mengandung cadangan sumber daya energi sebanyak 28 milyar barel menurut penelitian tahun 1993/1994 yang dilakukan oleh lembaga Penelitian Geologi Amerika Serikat (*United States Geological Survey-USGS*). Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih besar dan jika diproduksi secara maksimal di wilayah kepulauan Spratly sendiri akan mencapai 180.000-370.000 barel per hari yang setara dengan

²⁹ Xiang Jia, *Laut China Selatan Kembali Memanas*, dalam <http://www.jia-xiang.biz/laut-china-selatan-kembali-memanas/>, 31 Maret 2014, diakses pada 3 Desember 2017

tingkat produksi Brunei Darussalam tahun 2012. USGS juga memperkirakan adanya kandungan gas alam di wilayah tersebut sekitar 60%-70% dari jumlah hidrokarbon yang berada di wilayah tersebut yang dapat berkembang setiap tahunnya di masa depan.³⁰ Nilai ekonomis lainnya yakni secara geostrategis posisi Laut China Selatan berada dalam jalur perdagangan yang cukup sibuk di Asia Timur terlebih bagi Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Jalur perdagangan di Laut China Selatan memiliki nilai pasar industry mencapai \$5 triliun per tahun, angka ini merupakan jumlah yang cukup besar. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan oleh *The Wall Street Journal* nilai ekspor dan impor Amerika Serikat di Laut China Selatan mencapai \$1,2 triliun. Nilai ekonomis dan keberadaan sumber daya energi inilah yang menjadi akar permasalahan Laut China Selatan semakin pelik.³¹

Dilihat dari perspektif hukum, persengkataan Laut China Selatan adalah perbedaan interpretasi terhadap hukum laut yang di terbitkan oleh PBB. Penetapan batas garis laut yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on Law the Sea-UNCLOS III*) tahun 1982, bahwa kedaulatan territorial laut adalah 12 mil ditarik dari garis tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil.³² Tiongkok dianggap inkonsisten terhadap konvensi tersebut karena faktanya adalah Tiongkok telah

³⁰ Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.28

³¹ Sakinah Rakhma Diah Setiawan, *Ketegangan di Laut China Selatan Pengaruhi Perdagangan Global?*, dalam <http://bisnis.keuangan.kompas.com/read/2016/07/20/143000626/Ketegangan.di.Laut.China.Selatan.Pengaruhi.Perdagangan.Global.>, Bisnis Keuangan Kompas, diakses pada 3 Desember 2017

³² Hariyadi Wirawan dan Akbar Rayyan Subekti, *Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasi Terhadap keamanan Nasional Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.27

menandatangani dan meratifikasi UNCLOS, tercatat sebagai bagian tatanan hukum internasional Tiongkok harus mematuhi UNCLOS tersebut.³³ Sengketa kian memanas sejak Tiongkok mengumumkan klaim penuh atas Laut China Selatan tahun 2010. Hal ini juga direspon oleh Filipina yang mengajukan gugatan kepemilikan wilayah Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (*The Permanent Court of Arbitration*). Pemerintah Filipina pada tahun 2013 mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang mengenai ketidaksesuaian tindakan Tiongkok terhadap UNCLOS III 1982. Filipina menginginkan PBB bertindak tegas bahwa klaim yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan adalah ilegal. Dua tahun setelahnya PBB mengabulkan permintaan Filipina untuk tidak memberikan hak dan pembenaran atas tindakan klaim Laut China Selatan oleh Tiongkok karena tidak sesuai dengan UNCLOS III 1982 pada tahun 2015. Walaupun putusan PBB tidak diindahkan oleh Tiongkok, namun putusan tersebut memberikan kekuatan baru negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh klaim Tiongkok. Keputusan PBB sangat penting mengingat klaim Laut China Selatan yang berbentuk U oleh Tiongkok tidak memiliki garis koordinat yang jelas. Hal inilah yang menambah kompleksitas persengketaan Laut China Selatan.³⁴

Dari segi militer, persengketaan Laut China Selatan semakin rumit karena Tiongkok menggunakan kekuatan militernya demi mempertahankan klaim penuh atas sebagian besar Laut China Selatan. Sesungguhnya sentimen militer yang ada di Laut China Selatan telah lama terjadi, tahun 1988

³³ Kerry Lynn S. Nankivell, *Permainan Paling Berbahaya Tiongkok*, dalam <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>, Asia Pasific Defense FORUM, 7 Maret 2016

³⁴ Rizki Roza, *Indonesia di Tengah Peningkatan Ketegangan di Laut China Selatan*, Info Singkat Hubungan Internasional, 2016

pasukan Angkatan Laut PLA Tiongkok pernah terlibat interaksi langsung dengan pasukan Angkatan Laut Vietnam. Bentrokan terjadi ketika pasukan Angkatan Laut PLA Tiongkok berupaya untuk mengambil alih pulau tak berpenghuni yang ada di kepulauan Spratly bagian barat dan Fiery Cross.³⁵ Diketahui pada tahun 2014 Tiongkok mulai membangun 7 fitur dalam upayanya mendirikan pangkalan militer di kepulauan Spratly. Menurut analisis pakar *Centre for International and Strategic Studies* yang ada di Washington dan Asia mengungkapkan bahwa Tiongkok tengah membangun pangkalan udara sepanjang 3 km di kepulauan Spratly yang dapat menampung pesawat pembom jarak jauh seri H-6 milik Tiongkok. Upaya lain yang dilakukan Tiongkok dalam mengukuhkan klaimnya atas Laut China Selatan adalah dengan memperluas Gaven-Riff di utara kepulauan Spratly hingga seluas 115.000 meter persegi sejak bulan Maret 2014. Tidak hanya itu, Tiongkok juga membangun landasan pacu militer di Johnson South Reef, memperluas Hughes-Riff seperti yang dilakukan di Gaven Riff, dan membangun pangkalan di Mischief-Riff yang hanya berjarak 135 km dari pulau terluar Filipina.³⁶ Tabel berikut akan mendeskripsikan daerah buatan dan infrastruktur dalam 7 fitur sebagai upaya Tiongkok memperluas kepulauan Spratly menjadi kepentingan nasionalnya.

Dari sudut pandang politik, secara historis wilayah Laut China Selatan dari awal hingga saat ini tidak dimiliki oleh pemerintahan manapun. Wilayah Laut China Selatan pertama

³⁵ Kerry Lynn S. Nankivell, *Permainan Paling Berbahaya Tiongkok*, dalam <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>, Asia Pasific Defense FORUM, diakses pada 4 Desember 2017

³⁶ Alexander Freund, *Cina Mengimpikan Kekuatan Adidaya*, Deutsche Welle, 2015, dalam <http://m.dw.com/id/cina-mengimpikan-kekuatan-adidaya/a-18299804>, diakses pada 4 Desember 2017

kali di duduki oleh Jepang saat melangsungkan ekspansi wilayah pada Perang Dunia II. Sejak saat itu Jepang memiliki hak menggunakan seluruh area Laut Tiongkok Selatan secara eksklusif. Berakhirnya Perang Dunia II, tidak ada lagi otoritas yang menguasai Laut China Selatan secara resmi. Celah tersebut yang di gunakan beberapa negara di sekitar bahkan negara barat untuk melancarkan klaim wilayah terhadap Laut China Selatan. Terlebih dengan mengetahui potensi ekonomis dan strategis yang dimiliki oleh Laut China Selatan, negara-negara tersebut bersaing dalam mempertahankan klaim kepemilikan Laut China Selatan.³⁷

Pada gambar di bawah juga semakin memperlihatkan bagaimana sepak terjang Pemerintah Tiongkok dalam memperkuat klaimnya terhadap Laut China Selatan. Pada Mei 2015 kamera milik pesawat pengintai Amerika Serikat menangkap aktivitas kapal pengeruk milik Tiongkok sedang beroperasi di dekat Mischief Reef di kepulauan Spratly.

Gambar 6. Aktivitas Kapal Pengeruk Tiongkok di Kepulauan Spratly

³⁷ Kerry Lynn S. Nankivell, *Permainan Paling Berbahaya Tiongkok*, dalam <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>, Asia Pasific Defense FORUM, diakses pada 4 Desember 2017



Sumber: <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/> diakses pada 9 Desember 2017

Tiongkok menjadi satu-satunya negara pengklaim Laut China Selatan yang memiliki pangkalan militer berupa landasan udara di wilayah tersebut. Dari hasil pantauan *HIS Jane's Defense Weekly*, Tiongkok berhasil membangun pulau-pulau baru di atas karang di sekitar kepulauan Spratly yakni Fiery Cross reef, Gaven Reefs, Johnson South reef, dan Hughes Reef. Dalam laporan tersebut pada tahun 2014 Tiongkok berhasil membangun pulau di Fiery Cross Reef sepanjang 3000 meter dan lebar 250 meter sebagai landasan udara di tengah perairan Laut China Selatan. Menyangkut pembangunan cakram-cakram militer Tiongkok di wilayah tersebut, Jepang dan negara-negara lain menilai Tiongkok tidak konsisten terhadap komitmennya menjaga stabilitas kawasan, sebaliknya, pembangunan tersebut semakin memperkeruh persengketaan yang terjadi.³⁸

³⁸ IAPD Forum, *Klaim Laut dan Pergeseran Kekuatan*, Asia Pacific Defense Forum, 2015, dalam <http://apdf-magazine.com/id/klaim-laut-dan-pergeseran-kekuatan/>, diakses pada 4 Desember 2017

Agresifitas Tiongkok juga ditunjukkan melalui rencananya membangun pembangkit listrik nuklir maritim yang diprediksikan akan dapat digunakan untuk mendukung operasi di kawasan Laut China Selatan. Pengadaan pembangkit listrik nuklir ini memiliki kapasitas menyediakan energi untuk menghidupkan mercusuar, peralatan, pencairan, penyelamatan dan fasilitas pertahanan Tiongkok di Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok memprediksi pembangunan pembangkit listrik nuklir tersebut akan jadi dan dapat dilakukan uji coba pada tahun 2018. Dengan demikian perlahan-lahan tapi pasti, jika tidak dihentikan maka Tiongkok dapat merubah status quo Laut China Selatan dan menguasai penuh wilayah tersebut. Hal ini akan semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai negara terkuat di Asia Timur khususnya, mengingat perairan seluas 1,2 juta mil yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Laut China Selatan adalah lalu lintas lebih dari 50% perdagangan dunia.³⁹

Pada kenyataannya, eskalasi konflik ini mempengaruhi tatanan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Didukung dengan kapabilitas militer yang semakin kuat, Tiongkok cenderung ekspansif di Laut China Selatan. hal ini dibuktikan dengan upayanya pembuatan lahan baru dengan memperluas beberapa pulau yang ada di Kepulauan Spratly. Tiongkok telah meningkatkan status Tiongkok sebagai ancaman bagi Jepang yang benar-benar nyata di Asia Timur. Kompleksifitas yang terjadi di dalam konflik Laut China Selatan mencapai titik

³⁹ Gusti Aryani, *Menanti Babak Baru Sengketa Laut China Selatan*, Antara News, 2016, dalam <http://m.antaranews.com/berita/556894/menanti-babak-baru-sengketa-laut-china-selatan>, diakses pada 4 Desember 2017

puncak dengan melibatkan lebih dari empat aktor utama yang berada di wilayah tersebut.⁴⁰

Di satu sisi negara-negara tersebut sama-sama saling memperebutkan hak kepemilikan atas kepulauan yang ada di Laut China Selatan demi memenuhi hasrat kepentingan nasional mereka. Di sisi lain pihak-pihak yang bersengketa sama-sama ingin merespon agresifitas Tiongkok yang berusaha merubah status quo kepemilikan Laut China Selatan, termasuk Jepang. Kondisi inilah yang menjadi tantangan pertahanan keamanan Jepang dalam bentuk *gray zone*. Persengketaan Laut China Selatan tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi damai, namun juga tidak dapat didefinisikan dalam keadaan perang. Ancaman yang ditimbulkan oleh konflik tersebut menjadi salah satu alasan Jepang akhirnya menjalin kerjasama keamanan dengan Filipina tahun 2013. Skema dan mekanisme kerjasama baru Jepang dan Filipina akan membawa aliansi Jepang dan Filipina yang dapat menggabungkan kekuatan militer kedua negara untuk merespon agresifitas militer Tiongkok di Laut China Selatan.

C. Kepentingan Jepang di Laut China Selatan

Pada Januari 2013, Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario dan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kelautan. Pemerintah Jepang akan terus membantu Filipina dalam penguatan kapasitas penjagaan wilayah pantai Filipina. Langkah tersebut dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan alat komunikasi serta pembelian kapal serbaguna. Saat situasi di wilayah strategis berubah maka pemerintah Jepang dan Filipina perlu meningkatkan kemitraan strategis dan berbagai bentuk kerjasama. Hal ini

⁴⁰ Kerry Lynn S. Nankivell, *Permainan Paling Berbahaya Tiongkok*, dalam <http://apdf-magazine.com/id/permainan-paling-berbahaya-tiongkok/>, Asia Pasific Defense FORUM, diakses pada 4 Desember 2017

dilakukan untuk menciptakan suatu perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.⁴¹

1. Pengamanan Jalur Ekspor-Import dan Industri Jepang

Posisi Asia Tenggara berada di persimpangan jalur laut terbesar di dunia. Pertama adalah Jalur Utara Selatan yang menghubungkan antara kawasan Asia Timur dengan Australia, yang kedua adalah jalur Timur-Barat yang menghubungkan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Letak Asia Tenggara sangat strategis berdasarkan jalur ini, membuat Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan yang sangat penting baik perekonomian maupun keamanan. Oleh sebab itu Jepang memiliki kepentingan – kepentingan untuk melakukan akses secara bebas dan terbuka di jalur Asia Tenggara atas kepentingan ekonomi dan Laut China Selatan yang merupakan jalur laut untuk masuk ke dalam kawasan atau wilayah Asia Tenggara hingga wilayah Eropa dan menjadikannya penting untuk dijaga kebebasannya berlayarnya.

Adanya masalah di Laut China Selatan mengakibatkan jalur perdagangan tersebut menjadi tidak aman. Implikasinya adalah terganggunya Jepang sebagai salah satu pengguna jalur pelayaran tersebut untuk aktivitas ekspor-impornya. Dengan demikian ekonomi Jepang akan terganggu. Ketika ekonomi Jepang melemah maka hal ini akan menurunkan *bargaining position* dalam aliansi militer yang tergabung dalam blok barat sehingga aliansi tersebut juga ikut melemah. Karena pada dasarnya kekuatan ekonomi Jepang adalah alat untuk menempatkan Jepang pada percaturan dunia. Hal ini menjadi

⁴¹ Yesi Syelvia, *Jepang Perkuat Kerjasama Kelautan dengan Filipina*, SindoNews, Januari, 2013, dalam <https://internasional.sindonews.com/read/705764/40/jepang-perkuat-kerjasama-kelautan-dengan-filipina-1357809785> diakses pada 5 Desember 2017

sebuah tantangan bagi Jepang agar dapat menguatkan *bargaining position*.⁴²

Selain Impor Jepang yang cukup banyak, Jepang juga memasarkan barang – barang hasil industrinya tidak hanya di dalam negeri, Jepang juga memasarkan hasil industrinya keluar negeri atau *export*. Tidak hanya aktifitas impor saja yang melalui jalur Laut Cina Selatan namun aktifitas ekspor Jepang sebagian besar juga melalui jalur Laut China Selatan. Sebagai negara Industri yang sangat maju, Jepang membutuhkan pasokan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan industrinya. Impor utama Jepang adalah energi minyak, bahan mentah industri dan produk-produk pertanian dan perikanan. Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai US \$ 14 milyar). Jepang berada di peringkat keenam dengan total tagkapan ikan yang terus menurun sejak tahun 1996.⁴³

Jepang dan Filipina melakukan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua negara. Melalui kerjasama ini, Filipina memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan militernya dan kualitas pasukan militernya dalam menghadapi persengketaan dengan Tiongkok di wilayah Laut China Selatan. Filipina dapat memperoleh data maritime intai lewat dialog bilateral yang secara rutin dilakukan Jepang dan Filipina setiap tahunnya. Perbaikan alutsista dan peningkatan kemampuan pertahanan *Cost guard*. Melalui peningkatan kerjasama keamanan, Jepang mencapai peningkatan standar keamanan dan perluasan pengaruhnya di wilayah kawasan Asia Pasifik, khususnya di wilayah Asia Tenggara.

⁴² *Sengketa Teritorial Laut China Selatan*, Dalam <http://djangka.org/2012/04/30/sengketa-teritorial-laut-chinaselatan/>, diakses pada 8 Desember 2017

⁴³ *Ibid.*

Kerjasama keamanan antara Jepang dan Filipina membuka peluang Jepang untuk memperluas pengaruh militernya di negara-negara kawasan lewat kerjasama keamanan dengan Filipina yakni *Visiting Force Agreement* Jepang diizinkan untuk memasuki wilayah perairan Filipina, baik untuk melakukan latihan militer bersama dan pengisian bahan bakar. Terpilihnya Filipina sebagai partner Jepang menjalankan hubungan kerjasama keamanan tidak lepas dari kesamaan kepentingan kedua negara untuk melakukan peningkatan kekuatan militer, khususnya pada sektor maritime karena munculnya peningkatan kekuatan militer dan pengaruh Tiongkok pada masing-masing wilayah konflik.